

**KOLABORASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN
PECALANG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAMANAN
TERPADU BERBASIS DESA ADAT DI DESA PEMARON, BULELENG, BALI**

I Nyoman Tegar Arthadi
NPP. 32.0597

Asdaf Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
Program Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: nyomantegar@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Mu'min Ma'ruf, S.H, M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Issues related to public security and order in traditional village areas highlight the need for synergy between formal and traditional institutions in Pemaron Village, Buleleng District, Buleleng Regency, Bali Province. **Purpose:** The purpose of this study is to identify and analyze the collaboration between Satlinmas and Pecalang in implementing an integrated security system based on traditional villages in Pemaron Village, Buleleng District, Buleleng Regency. **Method:** This qualitative descriptive study uses an inductive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using the collaboration theory which includes five key dimensions. **Results/Findings:** reveal that the collaboration is reasonably well-established through face-to-face dialogue, mutual trust, and shared commitment. However, several obstacles remain, such as legal authority differences between Satlinmas and Pecalang, as well as limitations in funding and incentives, which impact their operational effectiveness. **Conclusion:** in conclusion, while the collaboration reflects the foundational principles of collaborative governance, further policy and resource support from the regional government is needed to optimize the function of the Sipandu Beradat Forum in maintaining community security based on local wisdom. **Keywords:** Collaboration, Pecalang, Sipandu Beradat, Satlinmas.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah desa adat menunjukkan adanya kebutuhan akan sinergi antara lembaga formal dan tradisional di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Mengidentifikasi dan menganalisis kolaborasi antara Satlinmas dan pecalang dalam pelaksanaan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Desa Pemaron Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. **Metode:** penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta menggunakan teori yang terdiri dari lima dimensi utama.

Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah terjalin cukup baik melalui dialog tatap muka, kepercayaan antar pihak, dan komitmen bersama. Namun, ditemukan beberapa kendala seperti perbedaan kewenangan hukum antara Satlinmas dan Pecalang, serta keterbatasan anggaran dan insentif yang berdampak pada efektivitas kerja merek. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, meskipun kolaborasi telah berjalan dengan prinsip dasar kolaboratif, masih diperlukan dukungan kebijakan dan sumber daya dari pemerintah daerah agar Forum Sipandu Beradat dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban berbasis kearifan lokal.

Kata kunci: Kolaborasi, Pecalang Sipandu Beradat, Satlinmas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk mencapai 278,8 juta jiwa (BPS, 2023), menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Malthus, berpotensi menimbulkan krisis akibat ketimpangan antara pertumbuhan penduduk yang bersifat geometris dan pertumbuhan pangan yang bersifat aritmetika. Hal ini memperburuk kondisi sosial seperti kemiskinan, pengangguran, serta terbatasnya akses terhadap pekerjaan dan layanan publik. Menurut Rahmadanita dan Nurrahman (2024), kondisi sosial yang tidak stabil dapat meningkatkan tingkat pelanggaran ketertiban umum, sehingga memerlukan peran aktif pemerintah daerah dalam penegakan regulasi dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945, negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti gelandangan dan pengemis. Pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, dibentuklah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai perangkat penting dalam struktur keamanan daerah yang bertugas mendukung stabilitas sosial di tingkat desa atau kelurahan (Yogaswara & Rukmana, 2024). Namun, peran Satlinmas kerap kali menghadapi keterbatasan dari sisi kapasitas dan keterlibatan masyarakat secara langsung. Dalam konteks lokal, Bali memiliki satuan keamanan adat yang disebut Pecalang. Pecalang berperan penting dalam menjaga ketertiban selama kegiatan adat dan keagamaan serta diakui legalitasnya melalui Pasal 18B UUD 1945 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Pecalang merupakan cerminan kearifan lokal yang dibentuk oleh keputusan Bendesa Adat dan berlandaskan awig-awig desa adat. Astara (2017) menjelaskan bahwa peran Pecalang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dalam menciptakan ruang toleransi dan ketertiban sosial yang berbasis budaya.

Tabel 1

Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Pecalang Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No	Kecamatan	SATLINMAS	Pencalang	Total
1	Tejakula	488	300	788
2	Kubutambahan	489	368	857
3	Sawan	473	418	891
4	Buleleng	851	437	1288

5	Banjar	526	493	1019
6	Seririt	682	546	1228
7	Busungbiu	411	450	861
8	Gerokgak	574	518	1092
9	Sukasada	501	448	949

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng diolah oleh peneliti, 2024

Data yang disajikan menunjukkan bahwa efektivitas Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban dapat ditingkatkan melalui dukungan Pecalang, yaitu satuan keamanan adat yang memahami konteks sosial dan budaya lokal. Pecalang mampu mengidentifikasi dan menangani potensi konflik sejak dini, berkat kedekatan mereka dengan masyarakat dan pengetahuan lokal yang mendalam. Ketika dikombinasikan dengan pendekatan regulatif dari Satlinmas, sinergi ini mampu menghasilkan sistem pengamanan yang lebih tanggap dan adaptif terhadap kondisi di lapangan. Dalam hal ini, kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang dipandang strategis untuk membentuk sistem pengamanan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal. Kolaborasi ini mencerminkan prinsip “community-based security” yang efektif karena menggabungkan kekuatan struktur formal dengan pengetahuan lokal yang mendalam (Sugiantiningsih *et al.* 2019). Efektivitas kolaborasi dalam penyelenggaraan sistem pengamanan di tingkat lokal tidak hanya bergantung pada kapasitas kelembagaan, tetapi juga pada sejauh mana pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dapat berjalan secara optimal. Dalam konteks ini, keberadaan aparat pemerintah daerah yang adaptif dan mampu membangun sinergi dengan lembaga komunitas lokal seperti Pecalang menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan responsivitas sistem keamanan berbasis kearifan lokal (Prabowo, 2019).

Forum Sipandu Beradat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 menjadi wadah koordinasi antara Satlinmas, Pecalang, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan menyelesaikan konflik sosial secara damai. Data kegiatan Forum menunjukkan adanya kolaborasi nyata antara Pecalang dan Satlinmas dalam pengaturan lalu lintas selama upacara adat serta dalam tindakan preventif terhadap potensi gangguan ketertiban seperti peredaran miras dan konflik antarwarga. Dalam praktiknya, Satlinmas bertindak sebagai penghubung regulatif, sementara Pecalang bertindak sebagai penjaga sosial dan budaya (Alfajri dan Batubara, 2024).

Sinergi ini tidak hanya mempercepat respon dalam situasi darurat, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan partisipasi masyarakat dalam program keamanan karena kepercayaan terhadap Pecalang sebagai representasi nilai-nilai lokal sangat tinggi. Kolaborasi seperti ini juga terbukti lebih efektif dibandingkan wilayah yang hanya mengandalkan perangkat formal, karena unsur adat memungkinkan penyelesaian konflik melalui pendekatan restoratif berbasis musyawarah (Winarko dan Mursyidah, 2024). Dengan demikian, penguatan kerja sama antara Satlinmas dan Pecalang menjadi krusial, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti pelaksanaan pemilu, upacara besar, serta dinamika sosial lainnya. Sinergi ini sejalan dengan pendekatan keamanan komprehensif yang adaptif terhadap konteks budaya lokal dan prinsip *good governance*.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai sistem pengamanan berbasis desa adat di Bali telah banyak dilakukan, terutama terkait efektivitas peran Pecalang dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam konteks adat. Namun, sebagian besar studi tersebut hanya berfokus pada peran tunggal Pecalang atau menyoroti sinergi secara umum dengan aparat keamanan formal tanpa menelusuri secara spesifik bagaimana mekanisme kolaboratif terbentuk dan dijalankan, khususnya dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Padahal, kolaborasi antara Satlinmas sebagai representasi lembaga formal negara dengan Pecalang sebagai simbol kekuatan adat merupakan elemen strategis dalam menciptakan sistem pengamanan yang menyatu antara nilai lokal dan struktur hukum nasional. Selain itu, masih sedikit penelitian yang secara mendalam menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut pada tataran praktis, khususnya di tingkat desa seperti di Desa Pemaron Kecamatan Buleleng. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara sistematis bentuk kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang serta menelaah secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan kolaborasi dalam sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan model sinergi keamanan berbasis kearifan lokal yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan formal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan penting dalam mengkaji kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang dalam sistem pengamanan desa adat. Puspawati et al. (2020) meneliti sinergi antara pemerintah Provinsi Bali dan lembaga adat dalam penanganan COVID-19 melalui Satgas Gotong Royong yang melibatkan Pecalang dan prajuru adat dalam penegakan protokol kesehatan berbasis awig-awig. Indrayanti (2021) membahas pergeseran peran Pecalang dari fungsi tradisional ke ranah sosial-politik yang belum diatur secara jelas dalam regulasi, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Nugraha (2024) menyoroti sinergi Satpol PP dan Pecalang di Kota Denpasar yang telah berjalan cukup optimal, namun masih menghadapi kendala dalam anggaran, kapasitas SDM, dan pembagian kewenangan. Apsaridewi, Rani, dan Wibawa (2022) meneliti interaksi hukum adat dan hukum daerah dalam sistem Sipandu Beradat sebagai bentuk pluralisme hukum, di mana kolaborasi Pecalang, TNI/Polri, dan aparat pemerintah membentuk sistem pengamanan yang berbasis lokal. Penelitian lain di Kabupaten Badung juga menemukan bahwa kolaborasi Satpol PP dan Pecalang dapat meningkatkan efektivitas pengamanan, meskipun koordinasi dan sumber daya masih menjadi tantangan. Wulandari (2020) menunjukkan peran aktif Pecalang dalam menjaga ketertiban selama pandemi COVID-19 melalui pengawasan protokol dan edukasi masyarakat. Sementara itu, Pradnyana (2023) mengkaji kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang di Kecamatan Bebandem yang efektif menjaga keamanan saat upacara adat, tetapi masih terkendala koordinasi berkelanjutan dan sarana prasarana. Menyelaraskan temuan-temuan tersebut, teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2007) menjadi landasan penting dalam memahami bentuk kerja sama antar aktor pemerintahan dan non-pemerintah, yang menekankan partisipasi inklusif, dialog terbuka, dan proses pengambilan keputusan kolektif. Dalam konteks pengamanan berbasis desa adat, kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang mencerminkan model tata kelola kolaboratif di mana keberhasilan sangat bergantung pada kepercayaan, komitmen bersama, serta koordinasi lintas kelembagaan yang berkesinambungan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada upaya mengungkap dan menganalisis kolaborasi antara Satlinmas dan pecalang dalam pelaksanaan sistem

pengamanan terpadu yang berbasis pada desa adat di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur akademis dengan mengkaji secara spesifik bagaimana sinergi antara lembaga keamanan formal dan informal tersebut berjalan dalam konteks kearifan lokal desa adat, yang selama ini masih jarang dibahas secara mendalam. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan temuan terkait faktor penghambat dan pendukung kolaborasi tersebut, sehingga dapat menjadi bahan kajian perbandingan dan referensi bagi pengembangan teori maupun praktik keamanan terpadu di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian ilmiah, tetapi juga memberikan dasar yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi pengembangan kebijakan keamanan berbasis desa adat di masa depan.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kolaborasi antara Satlinmas dan pecalang dalam pelaksanaan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan berbagai faktor penghambat serta pendukung yang memengaruhi kolaborasi tersebut dalam sistem keamanan terpadu berbasis desa adat di Desa Pemaron. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kerja sama antara Satlinmas dan pecalang dalam menjaga keamanan di tingkat desa adat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dinilai paling tepat untuk menggambarkan secara mendalam realitas sosial serta makna di balik kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Creswell, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, yang juga dibantu oleh perangkat perekam, kamera, dan alat tulis untuk meningkatkan akurasi data (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Moleong (2004) yang mencakup tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan pada Agustus 2024 hingga Juni 2025, dengan lokasi di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng.

Informan dalam penelitian dipilih secara *purposive sampling* (Sugiyono, 2017), yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu bahwa mereka memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan mendalam tentang topik penelitian. Informan yang dilibatkan antara lain Camat Buleleng, Kepala Desa Pemaron, Kelihan Desa Adat Pemaron, Ketua Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng, anggota Satlinmas, anggota Pecalang, dan perwakilan masyarakat. Mereka dipilih karena memiliki pengalaman langsung, pemahaman kontekstual terhadap budaya lokal, serta keterlibatan aktif dalam implementasi keamanan berbasis adat (Patton, 2002). Selain data primer dari observasi dan wawancara, penelitian juga didukung data sekunder dari dokumen resmi, regulasi, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini diyakini dapat memberikan gambaran yang objektif dan menyeluruh terhadap dinamika kolaboratif yang terjadi di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi antara Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dan Pecalang (petugas keamanan adat Bali) dalam program SIPANDU Beradat di Desa Pemaron mencerminkan sinergi antara unsur formal negara dengan elemen adat dalam menjaga ketertiban dan keamanan berbasis lokal. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup pembagian tugas di lapangan, tetapi juga melibatkan proses komunikasi dan pengambilan keputusan bersama yang erat. Dalam pembahasan ini, kolaborasi tersebut dianalisis menggunakan lima dimensi utama.

3.1. Kolaborasi Satlinmas dan Pecalang

Kerja sama antara Satlinmas dan Pecalang dalam program SIPANDU Beradat di Desa Pemaron merupakan sinergi antara lembaga pemerintah dan unsur adat untuk menjaga ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal. Kerja sama ini melibatkan pembagian peran, tanggung jawab, serta komunikasi intensif dan pengambilan keputusan bersama. Analisis kolaborasi ini menggunakan lima dimensi utama kerja sama lintas lembaga dan didukung oleh enam unsur penting, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara, yang menjadi dasar untuk penguatan kerja sama ke depan.

1. Dialog Tatap Muka

Berdasarkan Dialog tatap muka menjadi sarana penting untuk membangun kepercayaan, mengurangi konflik, dan menciptakan pemahaman bersama antara Satlinmas dan Pecalang dalam pelaksanaan SIPANDU Beradat. Kedua pihak rutin terlibat dalam pertemuan koordinasi yang memungkinkan pertukaran informasi terbuka, klarifikasi perbedaan pandangan, dan penyepakatan langkah operasional bersama. Forum ini memperkuat dimensi interpersonal dalam kolaborasi dengan komunikasi yang lebih hangat dan berbasis pada gestur non-verbal. Pemimpin fasilitatif, seperti tokoh adat atau perwakilan pemerintah desa, juga berperan menjaga agar dialog tetap inklusif dan konstruktif. Dialog tatap muka dilakukan melalui rapat koordinasi desa, musyawarah adat, dan persiapan pengamanan upacara adat, yang menyamakan cara pandang dan memahami peran masing-masing.

Diskusi yang baik tercermin dari komunikasi dua arah yang terbuka, di mana kedua pihak saling mendengarkan dan memberikan masukan secara konstruktif. Sebelum Sipandu Beradat, Pecalang dan Satlinmas bekerja terpisah, dengan Pecalang fokus pada adat dan Satlinmas pada keamanan umum. Sipandu Beradat hadir untuk memperbaiki koordinasi yang lemah antara keduanya, mengintegrasikan kearifan lokal dan regulasi formal. Menurut Kepala Desa Pemaron, Putu Mertayasa, kolaborasi ini masih dalam tahap awal karena perbedaan pendekatan antara Satlinmas dan Pecalang. Dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah untuk memperjelas standar operasional dan mekanisme koordinasi. Kelihan Desa Adat Pemaron, I Made Pater, menyatakan meski struktur kerja belum mapan, interaksi sejarah mereka dalam pengamanan adat dapat menjadi dasar untuk memperkuat sinergi melalui komunikasi yang lebih baik. Secara keseluruhan, meskipun koordinasi sebelumnya lemah, pengalaman kolaborasi dalam konteks

adat menjadi dasar untuk membangun kerja sama yang lebih terstruktur, dengan komunikasi dan koordinasi yang lebih jelas di masa depan.

Kerja sama antara Satlinmas dan Pecalang dalam program Sipandu Beradat membutuhkan rasa saling menghargai yang tercipta melalui pengakuan terhadap perbedaan latar belakang dan peran masing-masing, dengan Satlinmas sebagai bagian dari pemerintah desa dan Pecalang sebagai bagian dari sistem adat. Perbedaan dasar legitimasi dan sumber hukum antara keduanya, yaitu regulasi formal pemerintah untuk Satlinmas dan hukum adat (awig-awig) untuk Pecalang, berpotensi menimbulkan konflik kewenangan jika tidak dikelola dengan desain institusional yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama, penyesuaian antara regulasi formal dan aturan adat, serta penguatan posisi forum Sipandu Beradat sebagai wadah pengambilan keputusan kolektif yang memastikan kesetaraan peran. Dengan desain ini, kolaborasi antara kedua pihak akan lebih efektif dan harmonis, dilandasi oleh saling menghormati, serta mampu menciptakan sistem keamanan yang berbasis pada penghargaan terhadap otonomi dan kontribusi unik masing-masing pihak.

2. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan antara Satlinmas dan Pecalang dalam program Sipandu Beradat berkembang seiring interaksi yang rutin, dengan Pecalang dipercaya oleh masyarakat adat karena pemahamannya terhadap nilai lokal, dan Satlinmas dipercaya karena legitimasi hukum serta pelatihan teknisnya. Kepercayaan ini diperkuat melalui praktik lapangan yang saling mendukung, seperti Pecalang yang membantu identifikasi risiko sosial dalam pengamanan adat, sementara Satlinmas menangani aspek teknis. Namun, ada kekhawatiran dari Pecalang terkait dominasi Satlinmas dalam pengambilan keputusan administratif, sehingga diperlukan mekanisme yang adil dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas. Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Buleleng menekankan pentingnya membangun kepercayaan melalui dialog terbuka dan pengakuan terhadap peran masing-masing pihak, di mana MDA bertindak sebagai penghubung antara Pecalang dan Satlinmas. Camat Buleleng juga menyoroti perlunya pendekatan inklusif dan komunikatif agar hubungan kerja yang didasari kepercayaan timbal balik dapat tercipta. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan struktur formal, tetapi juga dinamika sosial antar aktor, dengan tujuan menciptakan sinergi yang harmonis dalam menjaga ketertiban dan keamanan berbasis pada nilai adat dan hukum formal.

Komunikasi intensif antara Satlinmas dan Pecalang menjadi kunci terbentuknya kepercayaan di Desa Pemaron, terlihat dari frekuensi pertemuan yang terjadi menjelang dan selama kegiatan adat maupun non-adat. Selain rapat formal di Forum Sipandu Beradat, komunikasi informal juga dilakukan melalui diskusi di balai banjar atau percakapan personal antar individu kunci. Komunikasi ini bersifat dua arah, di mana Satlinmas menyampaikan kebijakan pemerintah dan Pecalang menginformasikan dinamika sosial masyarakat. Selain pertukaran informasi tentang potensi kerawanan dan pengamanan, penggunaan media modern seperti grup WhatsApp dan komunikasi radio juga mendukung koordinasi yang cepat dan efisien. Dengan komunikasi yang lancar, potensi miskomunikasi dapat diminimalkan, memperkuat kepercayaan antara kedua pihak.

Keterbukaan menjadi faktor kunci dalam memperkuat kepercayaan antara Satlinmas dan Pecalang. Di tingkat operasional, keterbukaan tercermin dalam saling berbagi informasi, termasuk data yang biasanya terbatas, seperti informasi kerawanan dari Satlinmas dan potensi konflik adat dari Pecalang. Selain itu, keduanya terbuka dalam memberikan kritik dan evaluasi, bersedia memperbaiki kekurangan tanpa saling menyalahkan. Faktor lain yang memperkuat keterbukaan adalah hubungan sosial di luar konteks institusional, karena banyak anggota Satlinmas dan Pecalang yang berasal dari desa yang sama atau memiliki ikatan kekeluargaan. Dengan keterbukaan yang terjalin, keputusan dalam kolaborasi menjadi lebih mengakar pada rasa saling memahami dan menghormati peran masing-masing.

3. Komitmen Pada Proses

Komitmen terhadap proses kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang tercermin dari konsistensi keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan tanpa mengedepankan ego sektoral, saling bergantung dalam mendukung peran masing-masing. Satlinmas memerlukan informasi lokal dari Pecalang, sementara Pecalang membutuhkan dukungan logistik dan akses hukum dari Satlinmas. Penulis menekankan pentingnya menjaga integritas Forum Sipandu Beradat agar tidak tercemar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Camat Buleleng, I Made Dwi Adnyana, menekankan bahwa komitmen dapat terwujud jika setiap anggota menyingkirkan ego pribadi dan menjadikan visi kolektif sebagai bagian dari kepentingan mereka. Penulis menyoroti bahwa keberhasilan kolaborasi bergantung pada kualitas kesadaran pribadi dan internalisasi nilai kolektif sebagai motivasi untuk bertanggung jawab. Meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait kepentingan pribadi, Satlinmas dan Pecalang tetap menunjukkan komitmen pada kepentingan bersama, mengutamakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam menghadapi konflik, kedua pihak lebih memilih menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah di tingkat desa daripada jalur birokrasi formal. Ketua MDA Kecamatan Buleleng menegaskan pentingnya transparansi, pengawasan internal, dan komitmen kuat terhadap kepentingan kolektif agar forum tetap berjalan sesuai tujuan menjaga keamanan dan kesejahteraan desa adat.

Pengakuan bersama menjadi fondasi moral dan sosial yang penting dalam kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang di Desa Pemaron. Kedua pihak menyadari bahwa peran masing-masing tidak dapat berdiri sendiri; Satlinmas mengakui kedekatan emosional, historis, dan budaya Pecalang dengan masyarakat adat, yang membuat mereka efektif dalam meredam konflik berbasis adat. Sebaliknya, Pecalang menghargai kapasitas Satlinmas dalam aspek legalitas, koordinasi dengan aparat negara, dan pengelolaan keamanan. Pengakuan ini terlihat jelas dalam pembagian tugas yang jelas dan tanpa tumpang tindih, seperti dalam pengamanan upacara adat besar, di mana Pecalang mengatur alur umat di pura, sementara Satlinmas mengamankan jalur lalu lintas dan berkoordinasi dengan kepolisian. Saat terjadi insiden kecil, seperti keributan antarpemuda, Pecalang yang lebih dekat dengan warga turun lebih dulu untuk meredakan situasi, diikuti dengan tindakan Satlinmas jika ada pelanggaran hukum. Pengakuan bersama ini terwujud

dalam pembagian tugas yang jelas, pengambilan keputusan bersama, dan sikap saling mendukung, menunjukkan bahwa kerja sama mereka tidak sekadar administratif, tetapi berbasis rasa saling menghargai kontribusi masing-masing.

Saling ketergantungan antara Satlinmas dan Pecalang menggambarkan hubungan yang saling melengkapi dalam menjalankan fungsi pengamanan secara efektif. Pecalang memiliki keunggulan dalam hal kedekatan sosial dan penguasaan norma adat, mengetahui potensi konflik atau tokoh masyarakat yang mungkin tidak tercatat secara administratif. Namun, mereka tidak memiliki wewenang hukum untuk menangani pelanggaran yang masuk ranah hukum positif negara, di mana Satlinmas berperan dengan dukungan instansi formal. Di sisi lain, Satlinmas, meski memiliki kewenangan hukum, sering kali kurang memahami konteks sosial dan budaya lokal, sehingga pendekatan mereka bisa dianggap kaku atau tidak diterima masyarakat tanpa bantuan Pecalang. Contoh konkret ketergantungan ini terlihat saat upacara Melasti, di mana Pecalang mengatur iring-iringan adat dan mengendalikan massa secara informal, sementara Satlinmas mengatur lalu lintas dan memastikan tidak ada pelanggaran hukum. Kedua pihak saling bergantung dan tidak bisa bekerja optimal tanpa peran satu sama lain, membentuk pola kerja kolaboratif yang memperkuat ikatan kerja sama jangka panjang.

4. Persamaan Bersama

Salah satu kekuatan utama kolaborasi di Desa Pamaron terletak pada pemahaman bersama tentang pentingnya keamanan yang berbasis adat. Kedua pihak, Satlinmas dan Pecalang, menyadari bahwa menjaga ketertiban bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga bagian dari pelestarian adat dan budaya lokal. Pemahaman ini terbentuk melalui proses belajar sosial yang terjadi dari pengalaman kerja sama di lapangan. Dalam wawancara, beberapa anggota Satlinmas mengungkapkan bahwa mereka semakin menghargai nilai-nilai adat setelah bekerja bersama Pecalang, sementara Pecalang juga mulai memahami pentingnya aspek legalitas dan prosedur formal yang diterapkan Satlinmas. Kesamaan visi ini tercermin dalam dokumen rencana pengamanan dan pembagian peran yang tidak saling bertabrakan, melainkan saling melengkapi, sehingga kolaborasi ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga ideologis.

Persamaan tujuan antara Satlinmas dan Pecalang di Desa Pamaron menjadi elemen kunci yang menyatukan pandangan mereka terhadap fungsi pengamanan di lingkungan desa adat. Meskipun berasal dari dua sistem yang berbeda—Satlinmas yang terstruktur dalam pemerintahan formal dan Pecalang yang berakar pada adat—kedua pihak memiliki tujuan yang sama: menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat. Pemahaman bersama ini terwujud dalam visi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan aturan nasional. Dalam praktiknya, meskipun Pecalang terbatas pada pengamanan kegiatan adat, mereka menyadari pentingnya peran Satlinmas dalam menghadapi kegiatan non-adat yang lebih besar. Untuk itu, dibentuklah Badan Keamanan Desa Adat (Bakamda), sebuah wadah yang mengintegrasikan Pecalang, Satlinmas, masyarakat umum, dan elemen lainnya dalam sistem pengamanan terpadu. Bakamda, yang bersifat sukarela namun terstruktur jelas, memperlihatkan sinergi yang efektif antara elemen formal dan adat dalam menciptakan keamanan yang

adaptif dan partisipatif. Keberhasilan sistem ini terlihat dalam peningkatan pengelolaan keamanan dalam acara besar, seperti Festival Kuliner Pamaron, yang berhasil tertib berkat kolaborasi berbagai pihak melalui Bakamda. Inisiatif ini mengilustrasikan bagaimana integrasi antara struktur formal dan kearifan lokal bisa menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan pengamanan. Dengan persamaan tujuan yang dibentuk melalui pengalaman bersama dan kerja kolaboratif, Satlinmas dan Pecalang dapat menyusun strategi yang efektif, membagi peran dengan jelas, dan meningkatkan efektivitas sistem pengamanan desa yang lebih harmonis dan inklusif.

Pernyataan pemikiran antar pihak di Desa Pamaron mencerminkan bentuk komunikasi terbuka yang sangat penting dalam memperkuat kerja sama antara Satlinmas dan Pecalang. Proses komunikasi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga melibatkan pertukaran ide, pertimbangan, dan alasan di balik setiap keputusan atau tindakan yang diambil. Dalam konteks Desa Pamaron, rapat koordinasi menjadi wadah penting di mana kedua pihak Satlinmas dan Pecalang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka secara setara dan terbuka. Sebagai contoh, saat rapat menjelang kegiatan adat besar, Pecalang memberikan informasi berbasis pengalaman dan dinamika sosial lokal yang terjadi di lapangan, seperti titik rawan yang perlu diperhatikan lebih seksama berdasarkan pemahaman adat. Di sisi lain, Satlinmas, yang memiliki perspektif formal dan analisis risiko yang lebih luas, memberikan pertimbangan berdasarkan aspek hukum dan pengamanan massa. Proses ini memungkinkan kedua pihak untuk saling melengkapi, sehingga keputusan yang diambil lebih holistik dan tepat sasaran.

Pernyataan pemikiran tidak hanya terjadi secara vertikal, di mana informasi mengalir dari pimpinan ke bawah, tetapi juga horizontal antar anggota tim lapangan. Dalam situasi yang berubah cepat di lapangan, misalnya saat terjadi perubahan dinamika yang mempengaruhi pengamanan, anggota Pecalang dapat langsung menyarankan pengalihan rute atau penyesuaian prosedur pengamanan kepada Satlinmas. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan fleksibel terjadi di berbagai tingkat, baik antar pimpinan maupun antar anggota yang terlibat langsung dalam operasi. Dengan adanya saluran untuk menyampaikan pemikiran secara terbuka ini, setiap anggota merasa didengar dan dihargai, yang pada gilirannya memperkuat rasa saling percaya dan meningkatkan kualitas kolaborasi. Keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan perintah struktural, tetapi hasil dari diskusi dan pertimbangan bersama yang memperhitungkan berbagai perspektif. Proses ini menciptakan dasar yang kuat untuk kepercayaan yang lebih dalam antara Satlinmas dan Pecalang, dan juga meningkatkan efektivitas pengamanan yang dijalankan.

5. Hasil Sementara

Hasil sementara dari kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang di Desa Pamaron menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam beberapa aspek. Kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang di Desa Pamaron telah memberikan dampak positif yang signifikan, seperti penurunan konflik saat upacara adat, meningkatnya respons masyarakat terhadap arahan keamanan, dan partisipasi warga yang lebih aktif dalam kegiatan pengamanan. Forum Sipandu Beradat

berperan penting dalam memfasilitasi evaluasi dan umpan balik terbuka antara kedua pihak, meningkatkan koordinasi dan kepercayaan bersama. Menurut Kelihan Desa Adat Pemaron, Bapak I Made Pater, kolaborasi yang lebih terstruktur melalui forum ini berhasil mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepala Desa Adat, Bapak Putu Mertayasa, juga mencatat peningkatan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan, mencerminkan legitimasi sosial yang semakin solid.

Meskipun hasil yang terlihat sudah sangat positif, perlu penambahan indikator kuantitatif untuk mengukur kesuksesan secara lebih akurat. Meski demikian, kolaborasi ini menunjukkan bahwa integrasi antara kearifan lokal dan struktur formal dapat menciptakan sistem keamanan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Pembagian tanggung jawab antara Satlinmas dan Pecalang berjalan dengan jelas dan proporsional. Satlinmas menangani pengamanan teknis, sementara Pecalang fokus pada pengamanan prosesi adat dan ketertiban sosial. Dalam praktiknya, keduanya saling melengkapi tanpa ada saling melempar tanggung jawab, seperti yang terlihat pada pengamanan upacara Piodalan. Kolaborasi ini tidak hanya berbasis pada tugas formal, tetapi juga pada kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan desa.

3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Kolaborasi Satlinmas Dan Pacalang Dalam Penyelenggaraan Sipandu Beradat Di Kecamatan Buleleng

Kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang di Desa Pemaron menghadapi beberapa faktor penghambat, yaitu faktor budaya, politik, dan institusi. Kepala Desa Pemaron, Putu Mertayasa, mengungkapkan tantangan dalam menyatukan perbedaan pendekatan antara Pecalang yang mengedepankan nilai adat dan Satlinmas yang berfokus pada hukum modern. Selain itu, perbedaan struktur organisasi antara lembaga adat dan pemerintah juga menjadi kendala, mengingat Pecalang beroperasi dalam kerangka adat yang lebih informal, sementara Satlinmas mengikuti prosedur formal. Masyarakat Desa Pemaron juga mencatat bahwa meskipun kerja sama antara kedua pihak sudah berjalan baik, ada kekurangan koordinasi yang terlihat saat keduanya saling menunggu dalam mengambil keputusan, mengarah pada kekacauan di lapangan. Hal ini mencerminkan kurangnya mekanisme koordinasi yang jelas. Untuk mengatasi hal tersebut, penting untuk memperkuat koordinasi melalui penyusunan SOP bersama, pelatihan lintas sektor, dan forum komunikasi rutin. Dengan langkah ini, diharapkan kolaborasi antara Pecalang dan Satlinmas dapat lebih terstruktur, efektif, dan responsif di masa depan.

1. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Untuk mengatasi faktor penghambat dalam kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang dalam program Sipandu Beradat, beberapa upaya telah dilakukan, terutama terkait dengan garis komando yang sulit dijalankan tanpa saling pengertian dan penghargaan. Kepala Desa Pemaron sering memfasilitasi dialog terbuka antara anggota Satlinmas dan Pecalang, sementara rapat koordinasi di tingkat Kecamatan dan Desa Adat juga dilaksanakan secara rutin untuk memperkuat kerja sama.

Camat Buleleng, I Made Dwi Adnyana, S.STP, M.AP, mengusulkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan kolaborasi ini. Pertama, pembentukan Forum Kolaborasi sebagai wadah diskusi terbuka antara Satlinmas, Pecalang, dan pemangku

kepentingan lainnya. Kedua, pelatihan dan workshop gabungan untuk memperdalam pemahaman tentang peran masing-masing dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Ketiga, penyusunan protokol kolaborasi yang jelas untuk mengatur mekanisme kerja sama dalam berbagai situasi. Keempat, sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerja sama ini. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memperkuat kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang, serta menciptakan sistem keamanan yang lebih efektif di Kecamatan Buleleng.

2. Faktor Pendukung Kolaborasi Satlinmas Dan Pecalang Dalam Penyelenggaraan Sipandu Beradat Di Kecamatan Buleleng

Keberhasilan kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat didukung oleh beberapa faktor utama, seperti dukungan regulasi, komitmen antaraktor, dan keterlibatan masyarakat. Camat Buleleng, I Made Dwi Adnyana, menyatakan bahwa regulasi yang kuat, seperti Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020, serta keberadaan Forum Sipandu Beradat sebagai ruang koordinasi yang jelas, sangat mendukung efektivitas kolaborasi ini. Forum ini menggabungkan pendekatan budaya dan keamanan yang holistik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan budaya. Selain itu, masyarakat Desa Pemaron juga mencatat bahwa kolaborasi ini semakin baik dari waktu ke waktu. Pecalang yang memahami norma lokal dapat menenangkan masyarakat, sementara Satlinmas membawa aspek hukum dan pengamanan teknis. Keterbukaan dan komunikasi yang baik antara keduanya menjadi kunci dalam menciptakan pengamanan yang efektif dan terpadu. Kolaborasi ini menciptakan keseimbangan antara pendekatan budaya dan legal-institusional dalam menjaga ketertiban masyarakat. Kepala Desa Pemaron menekankan pentingnya komitmen dan komunikasi yang intensif antara Satlinmas dan Pecalang. Meskipun tantangan seperti pembagian tugas yang belum sepenuhnya jelas dan komunikasi yang tumpang tindih masih ada, rasa saling menghargai dan komitmen bersama tetap menjadi pondasi penting bagi keberhasilan kolaborasi ini. Dengan adanya peraturan yang jelas dan Forum Sipandu Beradat sebagai wadah koordinasi, potensi konflik dapat diminimalisir, dan kolaborasi dapat berjalan lebih terstruktur. Keberhasilan kolaborasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kearifan lokal dan pendekatan profesional dalam pengelolaan keamanan berbasis masyarakat. Dialog rutin, pelatihan bersama, serta keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas kolaborasi ini. Melalui dialog tatap muka, trust-building, dan komitmen bersama, kolaborasi ini dapat terus berkembang, menciptakan sistem keamanan berbasis desa adat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pecalang dalam penyelenggaraan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat (Sipandu Beradat) di Desa Pemaron berjalan cukup baik, meskipun tidak tanpa tantangan. Kolaborasi tersebut mencerminkan adanya kemauan untuk bekerja sama dan membangun sinergi antara unsur pemerintah dengan lembaga adat dalam menciptakan

ketertiban dan keamanan lingkungan desa. Forum Sipandu Beradat menjadi wadah yang memungkinkan kedua pihak saling berkoordinasi dan berbagi peran sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing. Dalam pelaksanaannya, terdapat keselarasan tugas yang cukup efektif antara Satlinmas sebagai bagian dari aparat negara dan Pecalang sebagai representasi lembaga adat, terutama dalam pengamanan kegiatan upacara keagamaan, pemantauan keamanan harian, serta dalam penanganan situasi darurat tertentu. Namun demikian, kendala tetap ditemukan, seperti terbatasnya kewenangan formal bagi Pecalang dalam penegakan hukum, yang membuat koordinasi dengan aparat penegak hukum sering kali tidak berjalan maksimal. Selain itu, keterbatasan insentif dan dukungan sarana prasarana turut mempengaruhi motivasi dan efektivitas kerja di lapangan. Pecalang dan anggota Satlinmas sering bekerja dengan fasilitas yang seadanya dan tanpa dukungan operasional yang memadai, sehingga potensi maksimal dari kolaborasi ini belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menegaskan bahwa sinergi kelembagaan tidak cukup hanya dibangun melalui forum komunikasi, tetapi juga harus didukung oleh aspek struktural dan sumber daya yang konkret.

Menariknya, keberhasilan kolaborasi ini tampak sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan hubungan interpersonal antar anggota kedua lembaga. Ketika terdapat hubungan yang baik dan saling percaya, proses kerja sama berlangsung lebih mulus dan efisien. Hal ini menjadi bukti bahwa kolaborasi tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada modal sosial yang terbentuk di antara aktor-aktor lokal. Dalam konteks Desa Pamaron, kepercayaan dan komitmen antar aktor memang sudah terbentuk, tetapi masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal regulasi yang memberi legitimasi lebih kuat kepada Pecalang dan struktur pembiayaan yang berkelanjutan. Selain itu, temuan ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung sistem pengamanan berbasis desa adat. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari sistem keamanan, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam menjaga ketertiban melalui kepatuhan terhadap norma adat dan partisipasi dalam forum desa. Keterlibatan ini penting karena membentuk rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap keamanan lingkungan. Dalam hal ini, kearifan lokal seperti awig-awig dan tradisi gotong royong menjadi kekuatan sosial yang memperkuat efektivitas sistem pengamanan yang diterapkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan tidak selalu harus bergantung sepenuhnya pada aparat negara, tetapi dapat dikolaborasikan dengan kekuatan lokal yang memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat.

Perbedaan kondisi antara Desa Pamaron dan wilayah lain seperti Dusun Tista menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi sangat kontekstual, tergantung pada karakteristik wilayah, struktur sosial, dan hubungan antar lembaga. Di beberapa desa, Pecalang dapat menjalankan fungsi pengamanan secara mandiri dan optimal, sementara di tempat lain masih diperlukan penguatan dari aspek regulatif dan sumber daya. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pengamanan desa adat tidak dapat diterapkan secara seragam, melainkan perlu disesuaikan dengan kondisi lokal yang ada. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman tentang dinamika kolaborasi antara lembaga negara dan lembaga adat di tingkat desa. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem pengamanan berbasis desa adat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh relasi sosial, kepercayaan, dan dukungan berkelanjutan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang di Desa Pamaron

dapat menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain, dengan catatan bahwa setiap model harus disesuaikan dengan realitas sosial dan kultural setempat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pecalang dalam penyelenggaraan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Desa Pamaron telah berjalan cukup efektif dan menunjukkan sinergi yang baik dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, terutama melalui Forum Sipandu Beradat. Kolaborasi ini ditopang oleh lima dimensi teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2007), yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. **Keterbatasan penelitian**, Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya adalah lingkup wilayah yang hanya mencakup satu desa adat sehingga belum dapat mewakili kondisi kolaboratif di wilayah Bali secara umum. Selain itu, keterbatasan anggaran dan insentif bagi pelaksana di lapangan, serta keterbatasan waktu peneliti dalam menjangkau seluruh kegiatan kolaboratif, turut mempengaruhi kedalaman temuan. **Arah masa depan penelitian**, Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan agar memperluas cakupan wilayah studi ke beberapa desa adat lainnya guna memperoleh gambaran komparatif yang lebih menyeluruh, serta mempertimbangkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas kolaborasi secara lebih terukur. Penelitian lanjutan juga dapat mendalami aspek kelembagaan dan regulasi yang mengatur kolaborasi Satlinmas dan Pecalang agar kolaborasi ini dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Majelis Desa Adat Kecamatan Buleleng, Camat Buleleng, Kepala Desa Pamaron, Kelihan Desa Adat Pamaron, Anggota Satlinmas, Anggota Pecalang, Masyarakat, serta para informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing, para pengajar, dan seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan, motivasi, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Tak lupa, saya menghargai segala bentuk dukungan dari keluarga, rekan mahasiswa, serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri, R., & Batubara, Y. E. (2024). Capacity building of community protection units in facing the 2024 simultaneous general elections in Karang Bindu Village, Rambang Kapak Tengah District, Prabumulih City, South Sumatera Province. *Jurnal Tatapamong*, 6(2), 102–115.
- Apsaridewi, K. I., Rani, N. L. M. E., & Wibawa, I. P. S. (2022). Interaksi hukum daerah dan hukum adat dalam sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. *Jurnal Hukum*, 5(2).

<http://repo.unhi.ac.id/bitstream/123456789/2192/1/2022%20Sinta%205%20Interaksi%20Hukum.pdf>

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astara, I. W. (2017). Public policy and role of traditional security officer (Pecalang) of religious tolerance in the Traditional Village Kuta-Bali. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 62, 1–7.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah penduduk pertengahan tahun*. Diakses pada 24 Februari 2025, dari <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (3rd ed.). Los Angeles: Sage Publications, Inc.
- Diana Putra, I. G. D. (2023). Optimalisasi peran Pecalang dalam menjaga ketertiban di Dusun Tista, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(2), 101–112.
- Indrayanti, K. W. (2021). Perkembangan peran Pecalang sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 12(3). <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/7093>
- Moleong, L. J. (2004). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, I. G. N. B. D. (2024). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pecalang dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Denpasar.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Prabowo, H. (2019). Constructing the ideal model of local government guidance and control effectiveness in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(1), 1–20. <http://eprints.ipdn.ac.id/5450/3/JURNAL%20AMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH%20HADI%20PRABOWO.pdf>
- Pradnyana, I. M. W. (2023). *Kolaborasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pecalang dalam penyelenggaraan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diakses dari <https://eprints.ipdn.ac.id/18733>
- Puspawati, D. A., Putri, I. G. A. P. D., & Ekayanti. (2020). Sinergi pemerintah berbasis adat dalam upaya penanganan COVID-19. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1176>
- Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2024). Analysis of the enforcement of regional regulations on public order, peace, and community protection in Bandung City. *Jurnal Tatapamong*, 6(2), 172–187.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiantiningsih, A. A. P., et al. (2019). Enhancing environmental quality through community participation based on traditional rules: Empowering the new role of Pecalang in Bali. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 54(5).

- Suputra, N. P. M. (2020). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Badung* (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Winarko, A. D., & Mursyidah, L. (2024). Empowerment of Satlinmas in improving public order and security. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3).
- Wulandari, N. M. L. (2020). *Efektivitas kearifan lokal desa adat dalam penanganan COVID-19 di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Studi di Desa Adat Sading)*. Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Yogaswara, A. R., & Rukmana, M. G. (2024). Empowering the Community Protection Unit members by the Community Protection Task Force of Tanah Bumbu District, South Kalimantan Province. *Jurnal Tatapamong*, 6(2), 155–171.
- Yuda, I. K. (2024). *Kepercayaan dan Komitmen Antar Aktor dalam Sistem Pengamanan Terpadu di Kabupaten Karangasem*. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Daerah*, 8(1), 77–90.

